

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

Dea Fatzrin¹⁾, Ananta Prathama²⁾

*Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa timur 60294
Email Korespondensi : *deafatzrin@gmail.com*

ABSTRACT

Indonesia as a country with a population spread across various islands certainly has differences in each region or region. Prosperity that is built in every region or region in Indonesia can enable people to have a decent standard of living. Welfare and empowerment are interconnected in society. Community empowerment in villages also needs to be carried out continuously so that the local economy can compete in the current era of globalization. This is the basis for this research. The aim of this research is to determine the role of BUMDes in empowering the community of Kedungwonokerto Village, Prmain District, Sidoarjo Regency. The village government forming BUMDes is one step in reviving the local village economy. The role of BUMDes in community empowerment can be seen as the first step in helping to improve the local village economy. The village government together with BUMDes contribute by becoming a forum for existing and newly started business actors so that they can continue to grow and develop. This research uses qualitative research based on the results of observations, interviews and documentation. The results of this research are that BUMDes provides efforts to empower the community through training and outreach activities, creating a website to sell products online, establishing a special place for village communities to sell or culinary as well as bazaar activities aimed at introducing village community business products.

Keywords : *Community empowerment; Village government; BUMDes;*

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang tersebar diberbagai pulau tentunya memiliki perbedaan disetiap wilayah atau daerah masing-masing. Kesejahteraan yang dibangun disetiap wilayah atau daerah di Indonesia dapat membuat masyarakat mempunyai taraf kehidupan yang layak. Kesejahteraan dan pemberdayaan memiliki keterkaitan dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di desa juga perlu untuk dilakukan terus-menerus agar ekonomi lokal dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Hal tersebut menjadi sebuah landasan penelitian ini dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prmain Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah desa membentuk BUMDes merupakan salah satu langkah dalam membangkitkan ekonomi lokal desa. Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dapat dinilai sebagai langkah awal dalam membantu meningkatkan ekonomi lokal desa. Pemerintah desa bersama BUMDes memberikan kontribusi dengan menjadi wadah para pelaku usaha yang sudah ada maupun baru merintis agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yakni BUMDes memberikan upaya dalam pemberdayaan masyarakat melalui bentuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi, membuat sebuah *website* untuk menjual produk secara onlien, mendirikan tempat khusus untuk masyarakat desa berjualan atau serta kuliner serta kegiatan bazar yang ditujukan untuk memperkenalkan produk usaha masyarakat desa.

Kata Kunci : *Pemberdayaan masyarakat; Pemerintah desa; BUMDes*

1. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu langkah dalam upaya perkembangan ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat selalu memiliki ciri khas dengan pertumbuhan ekonomi. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah kemajuan keunggulan rakyat (Sugiman, 2018). Pembangunan kesejahteraan masyarakat masih dinilai hanya sebatas slogan atau ucapan dan belum tersistematis dengan terencana pembangunan ekonomi karena adanya kendala penanganan pembangunan yang masih belum menyeluruh menggapai permasalahan mendasar (Rahman, 2018). Kesejahteraan juga saling berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh tanpa terkecuali. Menurut Margono Slamet (2000) dalam (Utami, 2019) Pemberdayaan masyarakat adalah ungkapan dari tujuan penyuluhan pembangunan. Tujuan yang dimaksud meliputi bagaimana cara mengembangkan mutu sumber daya manusia (SDM), terutama dalam membangun dan memperbaiki kondisi masyarakat untuk menggapai mutu hidup yang lebih bermutu.

Dalam prakteknya di kehidupan sehari-hari, pemberdayaan mempunyai arti yakni sebuah motivasi atau semangat, arahan atau tuntunan dalam meningkatkan kemahiran masyarakat secara individu atau kelompok agar dapat mandiri. Usaha itu adalah sebuah langkah dari sebuah mekanisme pemberdayaan untuk memperbaiki tindakan, mengubah kebiasaan lama menuju tindakan baru yang lebih baik, dalam memajukan taraf hidup dan kesejahteraannya (Margayaningih, 2018). Mengutip dari buku Mardianto dan Subiato (Subiato, 2012) mendefinisikan pemberdayaan merupakan sebuah langkah agar setiap orang lebih kuat dalam ikut serta diberbagai kendali, mempengaruhi, fenomena-fenomena serta lembaga atau organisasi yang memiliki pengaruh dalam kehidupan. Pemberdayaan memaksa bahwa orang mendapatkan keahlian, wawasan dan kekuasaan yang sanggup dalam mempengaruhi kehidupan individunya dan kehidupan individu lain yang menjadi pengamatannya. Menurut dari Hikmat (2013) (Sujatmiko et al., 2023) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah pertentangan perubahan dasar sebuah pembangunan yang mengutamakan perkembangan dan ketentraman. Sebagai semua kontradiksi dari perubahan dasar yang selama ini digunakan, pemberdayaan bukan meletakkan penduduk sebagai tujuan, namun diletakkan sebagai poin dari proses pembangunan tersebut. Penduduk dibentuk sebagai tokoh utama dari perluasan yang menjadi fokus pembangunan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil menengah mampu mengembangkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang kuat dan mandiri (Andriyanti et al., 2023)

Mengutip dari buku Mardianto dan Subiato (Subiato, 2012) Terdapat 4 hal pokok dalam pemberdayaan yang perlu diperhatikan diantaranya : Bina manusia yang artinya semua kegiatan atau aktivitas pengembangan, pemberdayaan, pendampingan keterampilan untuk sumber daya manusia baik dari diri sendiri (individu) maupun kelompok. Kedua, bina usaha yang artinya kegiatan yang dilakukan berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat yang memberikan manfaat peningkatan ekonomi masyarakat. Ketiga, bina lingkungan yang artinya dalam setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak terlepas dari lingkungan sekitar yang saling berhubungan antara makhluk sosial dengan lingkungan sosial sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan berkelanjutan. Keempat, bina kelembagaan artinya kelompok atau organisasi yang memiliki relasi sosial luas berguna untuk membantu mengembangkan kemampuan serta kemandirian masyarakat bahkan meningkatkan pengetahuan yang diperoleh.

Desa menurut H.A.W. Widjaja (Erni, 2021) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menerangkan bahwa desa merupakan wujud dari integritas penduduk hukum yang memiliki susulan asli dengan berkaitan pada hak dasar yang bersifat khusus. Hal dasar pada sebuah gagasan yang bersangkutan. Pemerintahan desa merupakan kebergagamaan, otonomi asli, pendemokrasian, partisipasi dan pemberdayaan manusia. Pemerintah desa menjadi pemangku pemerintahan tingkat desa dengan dipimpin oleh kepala desa dan didukung oleh unit anggota desa sebagai bagian dari pemangku pemerintahan desa. Pemerintahan tentu saja diperlukan oleh rakyat untuk mengayomi, membenahi serta memenuhi kebutuhan rakyat dengan sifat dasar negara yang bersifat memaksa, kekuasaan dan mencakup keduanya. Sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan optimal dan diolah secara maksimal oleh pihak pemerintah desa itu sendiri.

Potensi desa merupakan sesuatu hal yang desa punyai meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai aset awal yang perlu ditata dan dikelola dengan baik demi keberlangsungan dan peningkatan desa. Salah satu potensi desa yang belum optimal dalam proses dan peningkatannya adalah dari segi sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, usia muda maupun dewasa (Rizal et al., 2020). Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUMDes, Badan kerja sama antar-desa, forum kerja sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya (Nardin, 2019). Potensi desa yang dimiliki dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi lokal desa salah satunya dengan adanya bantuan UMKM dan BUMDes.

dampak positif yang diperoleh dari daya peningkatan ekonomi desa melalui UMKM dan BUMDes menjadi sebuah langkah serta strategi dalam terus mengupayakan kesejahteraan dan pemberdayaan

masyarakat desa. Selain mendapatkan dampak positif dari adanya UMKM tersebut, pelaku bisnis juga dipandang sebagai salah satu faktor meningkatkan pendapatan perkapita maupun pendapatan ekonomi di daerah tersebut (Dwijanto, 2023).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:4) dalam (Ismawati, 2020), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebuah lembaga atau organisasi usaha desa yang didalamnya dikendalikan oleh warga desa dan pihak pemerintah desa sebagai rangka usaha meningkatkan dan mengoptimalkan ekonomi desa serta didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat mengkoordinasi usaha yang telah dikembangkan oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk menumbuhkan serta menambah penghasilan masyarakat di desa (Maulana et al., 2021). Terdapat langkah yang hadir supaya desa dapat mewujudkan sumber keuangan desa yaitu dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Didirikannya BUMDES tersebut harus dengan mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi desa baik itu Sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) agar adanya BUMDES dapat bermanfaat dan berjalan seimbang dengan program maupun usaha BUMDES juga harus diupayakan agar dapat berkesinambungan (Christyana & Mutmainah, 2023).

Di desa Kedungwonokerto, BUMDes Kedungwonokerto terbilang masih baru dibangun dan sudah banyak pelaku usaha yang mulai memadati area tersebut sebelum adanya BUMDes. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak BUMDes dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, pihak BUMDes juga telah membuat sebuah *website* yang isinya tentang produk-produk yang dijual secara online. Peran BUMDes mampu memberikan dukungan serta bantuan bagi masyarakat desa. Adanya sentra kuliner dan produk buatan warga yang dikelola oleh BUMDes diharapkan menjadi langkah pemberdayaan masyarakat lebih meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat terutama di lingkungan pedesaan. Upaya yang dilakukan juga sebagai bukti bahwa BUMDes hadir memberikan perubahan serta mengembangkan ekonomi desa dengan baik.

Penelitian ini merumuskan tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dalam mengupayakan peningkatan serta mengembangkan ekonomi lokal desa melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut dalam buku “Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan” (Sidiq Umar, 2019) penelitian kualitatif adalah strategi dalam meminta kejelasan yang menekankan pada pencarian sebuah makna, pengertian konsep, peristiwa, deskripsi tentang suatu kejadian atau kondisi, poin dan metode yang bersifat alami dan keseluruhan, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa metode atau cara serta disajikan secara naratif.

Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan jawaban dari suatu kejadian atau fenomena dengan menempuh penjelasan secara fakta dan logis dengan memakai pendekatan kualitatif. Menurut Anggara (2015:109) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sumber yang tersedia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

2. Pembahasan

BUMDes sebagai Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa yang mengupayakan dalam peningkatan ekonomi desa serta potensi desa tersebut. Di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Peran BUMDes dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat desa. BUMDes Kerto Emas Kedungwonokerto dalam hal ini melalui unit usahanya untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan melakukan pemasaran produk secara online untuk diteliti. Dalam penelitian ini, tahun 2020 belum pembentukan BUMDes. Hal ini juga bersamaan dengan banyak para masyarakat desa yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan perusahaan tempatnya bekerja. Pada tahun 2021 tepatnya bulan Desember, BUMDes Kedungwonokerto diresmikan dan mendapat pengakuan dari pemerintah Sidoarjo. Kesadaran para *stakeholder* dalam upaya menyejahterakan masyarakat desa melalui pemberdayaan yang dibangun bersama BUMDes membuat beberapa masyarakat desa termotivasi dan menghasilkan berbagai produk usaha yang nantinya bekerjasama dengan pihak BUMDes. Adanya BUMDes juga menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa karena BUMDes merupakan salah satu wadah yang memberikan pelayanan dan kontribusi dalam memajukan ekonomi desa serta meningkatkan usaha masyarakat desa dalam pengelolaan kapasitas ekonomi desa.

Penulis menggunakan metode pemberdayaan masyarakat yang dikutip dari buku Pemberdayaan masyarakat (Subiato, 2012) yang terdapat 4 hal pokok dalam pemberdayaan yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Bina Manusia

Salah satu dengan didirikannya BUMDes oleh pemerintah desa ditujukan untuk memberikan kontribusi yang dibutuhkan masyarakat terutama para pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya serta membantu memulihkan kembali ekonomi masyarakat desa. Bentuk dukungan yang dilakukan pemerintah desa dengan mendirikan BUMDes dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan nilai ekonomi lokal desa. BUMDes hadir menjadi wadah serta sarana dalam upaya peningkatan nilai ekonomi lokal desa dengan memberikan kontribusi baik pemberian bentuk pelatihan serta sosialisasi terhadap pelaku usaha untuk terus mengembangkan ide kreativitas dan inovasi yang dimiliki pelaku usaha. Peran

BUMDes bersama pemerintah desa dapat dilihat bahwa pengupayaan terus menerus dalam membangkitkan serta membantu kesejahteraan masyarakat jelas adanya dengan membantu memberikan fasilitas untuk berdagang secara *offline* (tempat berjualan sentra kuliner) dan *online* (*website*).

Berdasarkan hasil dari wawancara sebelumnya, bentuk upaya BUMDes dalam membedakan masyarakat terutama pelaku usaha lokal juga dibuktikan dengan mengadakan pelatihan serta sosialisasi yang bekerjasama dengan pihak eksternal atau internal. Pengupayaan tersebut menjadi salah satu langkah aktif yang dilakukan BUMDes agar masyarakat mendapat ilmu serta pengetahuan yang lebih untuk nantinya dikembangkan dalam usaha yang mereka jalani dengan kreativitas yang ada. Sosialisasi serta pelatihan yang terbentuk dapat menjadi bekal para pelaku usaha untuk memiliki ide kreasi yang dapat menarik konsumen dalam proses perdagangan. Hanya saja dalam sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan masih memiliki kekurangan salah satunya bidang pelatihan yang diberikan masih dilingkup makanan dan minuman. Berikut merupakan bukti BUMDes melakukan kegiatan pelatihan dengan pihak eksternal yang dimaksud terdapat gambar dibawah ini. (gambar 1)



Gambar 1. Kunjungan kerja dan pelatihan bersama PT. Yakult

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat desa, BUMDes melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh BUMDes bekerjasama dengan pihak PT.Yakult menjadi bentuk dari upaya nyata kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kemampuan serta kreasi masyarakat dalam usaha. Selain itu, upaya tersebut menjadi bentuk pemberdayaan BUMDes kepada dalam bidang bina manusia yang melibatkan masyarakat.

2. Bina Usaha

Selanjutnya, dalam bentuk upaya dari BUMDes yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat terutama pelaku usaha dengan memberikan akses serta metode-metode *modern* untuk digunakan dalam proses perdagangan. Hasil wawancara sebelumnya, BUMDes mencoba memberikan akses gampang dan dapat dikenali oleh semua orang bahkan diluar desa untuk melakukan pemesanan hasil produk olahan para pelaku usaha. BUMDes membuatkan sebuah *website* yang didalamnya berisikan produk unggulan milik para pelaku usaha yang

tergabung dalam BUMDes yang nantinya pemesanan dapat dilakukan secara *online* tanpa harus datang langsung ke tempat produksi. Meskipun masih banyak pelaku usaha yang kurang mengerti penggunaan *website* dan *website* masih belum menggunakan situs tetap maka pengoptimalan *website* kurang berjalan. Berikut bukti BUMDes melakukan pembuatan *Website* BUMDes yang dimaksud terdapat gambar dibawah ini. (gambar 2)



Gambar 2. *website* milik BUMDes

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa BUMDes memberikan fasilitas dengan membuatkan sebuah *website* yang digunakan untuk menjual hasil produk dari olahan masyarakat desa Kedungwonokerto kepada masyarakat luas agar semakin banyak peminat serta lebih dikenal banyak masyarakat di luar desa Kedungwonokerto.

3. Bina Lingkungan

Lingkungan yang disediakan pihak BUMDes juga menjadi salah satu bentuk upaya dalam pemberdayaan masyarakat desa. Didirikannya sentra kuliner yang diperuntukkan untuk tempat berjualan secara langsung dapat menjadi hal yang menguntungkan bagi pelaku usaha. Hal tersebut juga menambah daya tarik pembeli untuk mampir dan membeli hasil produk yang terdapat di sentra kuliner. BUMDes juga tidak membatasi jenis produk makanan dan minuman yang dijual baik secara *offline* maupun *online*. Walaupun dalam pemberian tempat khusus berjualan saat ini masih kurang bervariasi dan berfokus pada jenis makanan dan minuman. BUMDes membebaskan para masyarakat desa untuk menjual hasil produk mereka sehingga beberapa macam makanan memiliki kesamaan tetapi tidak menimbulkan ketersinggungan antar penjual karena mereka memiliki hak yang sama dalam berjualan. Dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh BUMDe, hal ini menjadi salah satu upaya serta bukti bahwa dengan dibentuknya BUMDes tidak menjadi penghalang atau batasan yang tercipta untuk menjual hasil produk masyarakat desa karena selagi hasil produk yang dijual tidak merugikan siapapun, kebebasan tersebut dalam terus berjalan. Berikut merupakan bukti BUMDes mendirikan sentra kuliner untuk pedagang yang berada di desa KEDungwonokerto yang dimaksud terdapat gambar dibawah ini. (gambar 3).



Gambar 3. Sentra kuliner milik yang didirikan BUMDes bersama pemerintah desa

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa BUMDes bersama pemerintah desa menyediakan dan mendirikan sentra kuliner sebagai bentuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa agar masyarakat desa lain yang memiliki usaha dapat berjualan secara langsung tanpa melalui media *online* dan sejenisnya. Sehingga masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk berjualan baik secara *online* maupun secara langsung berinteraksi dengan pembeli.

3. Bina Kelembagaan

Pihak BUMDes juga mengupayakan tindakan dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan kegiatan bazar atau kegiatan yang bertujuan memperkenalkan produk usaha milik masyarakat desa. Meskipun sebelumnya BUMDes juga sudah menyediakan tempat khusus untuk berjualan tetapi kegiatan seperti bazar juga masih dilakukan untuk meningkatkan hasil produk serta memperkenalkan lebih luas tentang produk yang dimiliki oleh masyarakat desa Kedungwonokerto. Berikut bukti BUMDes melakukan bazar atau memperkenalkan produk yang dimaksud terdapat gambar dibawah ini. (gambar 4)



Gambar 4. kegiatan bazar produk hasil olahan masyarakat desa

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa BUMDes berperan juga dalam mempromosikan hasil usaha milik masyarakat desa Kedungwonokerto agar semakin banyak dikenal banyak orang. Selain itu, BUMDes juga mengadakan serta menyediakan kegiatan bazar yang ditujukan untuk membantu

memperkenalkan hasil produk milik masyarakat desa Kedungwonokerto serta dalam berbagai kesempatan yang ada.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penulis menggunakan metode pemberdayaan masyarakat yang dikutip dari buku Pemberdayaan masyarakat (Subiato, 2012) yang terdapat 4 hal pokok dalam pemberdayaan yang perlu diperhatikan diantaranya :

1. Bina Manusia

Bina manusia yakni Semua kegiatan atau aktivitas dalam pengembangan, pemberdayaan, pendampingan keterampilan untuk sumber daya manusia baik dari diri sendiri(individu) maupun kelompok. Manusia menjadi fokus utama yang dijadikan sebagai bentuk dalam pemberdayaan masyarakat dengan meliputi lingkup materi pemberian masyarakat yang fokus pada dua hal tersebut yakni peningkatan kemampuan masyarakat yang terdiri dari konsep pendidikan dengan mencakup tiga ranah yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dari hasil observasi dan wawancara sebelumnya, menunjukkan jenis pelatihan yang dikembangkan oleh pihak BUMDes belum mencakup semua usaha yang ada. Sehingga ada pelaku usaha yang belum merasakan secara langsung dampak dari adanya sosialisasi yang terbentuk. Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan yang kurang intensif bahkan tidak ada jadwal yang pasti dalam setiap kegiatan pelatihan atau sosialisasi.

2. Bina usaha

Bina usaha yakni Kegiatan yang dilakukan berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat yang memberikan manfaat peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya bina usaha dapat membantu memperbaiki kesejahteraan masyarakat diberbagai sektor kegiatan untuk memberikan manfaat dan hasil guna peningkatan ekonomi masyarakat. Dari hasil observasi dan wawancara sebelumnya menunjukkan adanya perkembangan inovasi serta bantuan yang diberikan dapat menjadi salah satu bentuk upaya yang diberikan oleh BUMDes untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Inovasi yang terbentuk salah satunya adanya *website* untuk para pelaku usaha digunakan dalam memudahkan konsumen mencari dan memesan produk usaha yang ada. Meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana dan belum dapat dirasakan oleh pelaku usaha bahkan masih belum banyak pengguna yang belum memahami betul cara penggunaan *website* serta para konsumen yang belum memadai atau tidak dapat mengoperasikan secara optimal. Namun para pelaku usaha juga terus mendukung adanya inovasi yang dikembangkan oleh BUMDes.

3. Bina lingkungan

Bina lingkungan menjadi salah satu hal pokok dalam pemberdayaan yang dalam setiap kegiatan yang

dilakukan masyarakat tidak terlepas dari lingkungan sekitar yang saling berhubungan antara makhluk sosial dengan lingkungan sosial sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan berkelanjutan. Dari hasil observasi dan wawancara sebelumnya, menunjukkan bahwa tempat usaha untuk masyarakat yang memiliki usaha merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah desa dan BUMDes untuk meningkatkan produksi dan memperbanyak pelanggan yang datang untuk menikmati produk atau hasil usaha yang dinaungi oleh BUMDes. Meskipun tempat yang diberikan belum mencukupi semua pelaku usaha tapi pihak pemerintah desa dan BUMDes masih memiliki tempat sementara yang disediakan untuk berjualan. Serta tidak adanya penentuan produk usaha yang dijual atau tidak adanya batasan dalam menjual hasil produk usaha milik masyarakat. Hal ini menjadi salah satu dari beberapa upaya dalam memberikan kontribusi serta dukungan secara moral kepada seluruh masyarakat yang mau berusaha dan memiliki niatan yang kuat dalam mencari penghasilan serta peningkatan dalam pemberdayaan masyarakat di desa.

4. Bina kelembagaan

Bina kelembagaan artinya dalam kelompok atau organisasi yang memiliki relasi sosial luas berguna untuk membantu mengembangkan kemampuan serta kemandirian masyarakat bahkan meningkatkan pengetahuan yang diperoleh. dari hasil observasi dan wawancara sebelumnya, menunjukkan bahwa adanya keterlibatan pihak eksternal dan internal mempengaruhi proses perkembangan usaha milik masyarakat. Keterlibatan tersebut secara tidak langsung dapat menjadi bentuk usaha dari BUMDes dalam mensejahterakan serta memberdayakan masyarakat desa. Kerjasama yang dilakukan tentunya ditujukan untuk keberlangsungan usaha masyarakat desa yang dimiliki. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengadaan bazar, kegiatan ini dilakukan untuk menarik minat konsumen atau pengunjung untuk datang serta menyaksikan kegiatan yang berlangsung di bazar.

3. Kesimpulan

Pemberian dukungan dari pihak BUMDes dan pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam. Pengupayaan tersebut mulai dari pembentukan BUMDes dan hadir membantu dalam mengembangkan usaha masyarakat yang ada salah satunya menjadi jembatan perantara pelaku usaha dalam mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Selain itu, upaya dalam mengembangkan pola pikir dan motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan memberikan bentuk pelatihan dan sosialisasi dan membuat inovasi berupa *website* yang didalamnya terdapat hasil produk usaha lokal desa yang dijual secara *online*. Dalam dukungannya BUMDes menyediakan tempat khusus untuk para pelaku usaha dalam memasarkan hasil produk yang dikelola agar dapat dinikmati semua orang yang ingin berkunjung dan membeli hasil usaha mereka. Selain itu, BUMDes juga

tidak membatasi hasil produk masyarakat yang memiliki usaha sehingga mereka bebas untuk berjualan selagi jualan tersebut tidak merugikan pihak penjual dan pembeli. Kelembagaan eksternal maupun internal yang mendukung juga dapat menjadi upaya meningkatkan nilai ekonomi lokal desa. BUMDes bekerjasama pihak eksternal dalam menyelenggarakan kegiatan bazar yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat desa dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memasarkan hasil produk usaha mereka dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini, terdapat kekurangan yang muncul diantaranya jadwal pelatihan dan sosialisasi yang ada kurang rutin dilakukan, penggunaan *website* yang kurang optimal dan *Website* yang digunakan memiliki beberapa kendala akses sehingga penulis sempat tidak dapat untuk mengakses *website* tersebut. Selain itu, kurangnya dukungan bagi jenis usaha selain produk makanan dan minuman.

Saran yang dapat dilakukan oleh pihak BUMDes untuk meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat yakni dapat berupa memberikan jadwal rutin dalam pelatihan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha dengan pihak BUMDes, membuat situs tetap untuk penjualan melalui *website* BUMDes, memberikan dukungan bagi jenis usaha selain dari produk makanan dan minuman.

Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Andriyanti, T., Ramadany, F., Musleh, M., & Artikel, R. (2023). *Pemberdayaan usaha kecil menengah melalui ekowisata mangrove Info Artikel ABSTRAK*. 4(225), 2721–5148. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19752>
- Christyana, N., & Mutmainah, N. F. (2023). Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan UMKM Di Desa Plunjaran Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 56–69. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.46>
- Dwijanto, A. (2023). *Peningkatan Kemampuan Manajerial UMKM Sari Kedelai di Sumberrejo Kabupaten Pasuruan*. 4, 33–38.
- Erni, I. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (sebuah kajian tentang otonomi desa). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 6.
- Ismawati, N. R. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(1), 91. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v6i1.4250>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.

- Maulana, F., Mas'ud Said, M., & Hayat, D. (2021). Pengaruh Kinerja Organisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3, 209–220. <http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index-209->
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 140–145. www.publikasi.unitri.ac.id
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.
- Rizal, E., Siti Khadijah, U. L., & Khairul Anwar, R. (2020). Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Kegiatan Wisata Di Desa Cipacing Kabupaten Sumedang. *Tornare*, 2(2), 32–36. <https://doi.org/10.24198/tornare.v2i2.29183>
- Sidiq Umar, C. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In M. Anwar (Ed.), *CV. Nata Karya* (cetakan pe). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Subiato, M. d. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Sujatmiko, S., Orbawati, E. B., -, F., & Mukti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2528>
- Utami, A. D. (2019). *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Temanggung, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.